

Implementasi Fungsi Politik Sebagai Komunikasi Politik: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali

I Made Bagas Prasetya Ananda¹, I Ketut Putra Erawan², Gede Indra Pramana³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

prasetyaananda075@student.unud.ac.id,
ketut.erawan@ipd.or.id,
indrprama@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali dalam mempertahankan dominasi politiknya. Sebagai partai dengan hegemoni kuat di Bali, keberhasilannya tidak hanya bersandar pada faktor elektoral semata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur, laporan ini menganalisis bagaimana partai secara strategis mengimplementasikan fungsi-fungsi fundamentalnya pendidikan, sosialisasi, dan agregasi kepentingan sebagai instrumen komunikasi politik yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD PDI Perjuangan Bali berhasil menerjemahkan ideologi abstrak partai menjadi aksi-aksi komunikatif yang konkret dan beresonansi dengan budaya lokal, seperti perayaan Bulan Bung Karno dan kegiatan bakti sosial. Strategi ini secara efektif membangun hegemoni kultural dengan memfusikan identitas partai dengan identitas ke-Bali-an, diperkuat oleh peran ganda pemimpinnya sebagai ketua partai dan kepala pemerintahan. Disimpulkan bahwa dominasi partai merupakan buah dari orkestrasi komunikasi yang canggih dan

berlapis.

Kata Kunci: Komunikasi Politik; Fungsi Partai Politik; PDI Perjuangan Bali

ABSTRACT

This study examines the strategy of the Regional Leadership Council (DPD) of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Bali in maintaining its political dominance. As a party with strong hegemony in Bali, its success does not rely solely on electoral factors. Using qualitative research methods through a literature study approach, this report analyzes how the party strategically implements its fundamental functions education, socialization, and interest aggregation as integrated political communication instruments. The results show that the DPD of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Bali successfully translates the party's abstract ideology into concrete communicative actions that resonate with local culture, such as the celebration of Bung Karno Month and community service activities. This strategy effectively builds cultural hegemony by merge party identity with Balinese identity, strengthened by role leader doubles as both party chairman and head of government. It was concluded that the party's dominance is the result of sophisticated and multi-layered communication orchestration.

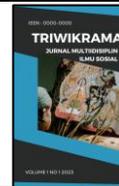
Keywords: Political Communication; Functions of Political Parties; PDI Perjuangan Bali

1. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia. Kehadirannya dianggap sebagai perwujudan dan lambang dari sebuah negara modern, sehingga hampir semua negara, baik yang menganut sistem demokrasi maupun komunis, negara maju maupun berkembang, memiliki partai politik sebagai salah satu pilar utamanya

*Corresponding author

E-mail addresses: prasetyaananda075@student.unud.ac.id



(Suwendra & Putri, 2023). Dalam kerangka sistem politik demokrasi, partai politik berfungsi sebagai mata rantai krusial yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah (Subekti dkk, 2025). Ia bertindak sebagai jembatan antara masyarakat sipil dengan negara, atau dengan kata lain, menjadi penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah (Subekti dkk, 2025).

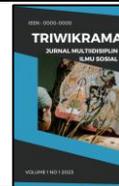
Secara teoretis, partai politik mengemban serangkaian fungsi fundamental yang menjadi justifikasi eksistensinya. Fungsi-fungsi ini, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai literatur ilmu politik, meliputi: sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, agregasi dan artikulasi kepentingan, rekrutmen politik, serta pengelolaan konflik (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022). Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya, sementara sosialisasi politik adalah proses penanaman nilai dan orientasi politik (Suwendra & Putri, 2023). Agregasi dan artikulasi kepentingan merujuk pada fungsi partai untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang beragam untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik (Litbang Kompas, 2024). Fungsi-fungsi ini pada hakikatnya adalah mekanisme yang digunakan oleh partai untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan politik, yang umumnya diraih melalui jalur konstitusional seperti pemilihan umum (Litbang Kompas, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi ini bukanlah sekadar tugas administratif, melainkan inti dari aktivitas politik sebuah partai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki sejarah yang kompleks dan sarat dengan dinamika politik nasional. Kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fusi partai pada era Orde Baru tahun 1973, yang menggabungkan lima partai politik, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI), menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Suwendra & Putri, 2023). PDI di masa Orde Baru kerap mengalami konflik internal yang dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Puncak dari dinamika ini adalah Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang mendongkel Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum dan memicu peristiwa 27 Juli 1996 (Pratiwi & Rahmawati, 2023). Pasca-reformasi, Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan, dengan menambahkan sufiks "Perjuangan" untuk membedakan faksinya dari faksi yang didukung pemerintah Orde Baru, sekaligus membingkai identitas partai dalam narasi perlawanan dan perjuangan (PDI Perjuangan, 2025).

Secara ideologis, PDI Perjuangan secara tegas menetapkan Pancasila, khususnya sebagaimana yang dirumuskan pada 1 Juni 1945, sebagai landasan fundamentalnya. Ideologi ini diterjemahkan lebih lanjut melalui ajaran-ajaran politik Soekarno, yang dikenal sebagai Marhaenisme. Konsekuensi dari penetapan ideologi ini adalah pemosisian PDI Perjuangan yang berbeda dari partai politik lainnya, dengan penekanan kuat pada nasionalisme, kedaulatan ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan (Trisakti). Citra politik yang dibangun secara konsisten adalah sebagai partai sekuler-nasionalis yang menjadi representasi "wong cilik" atau rakyat biasa (PDI Perjuangan, 2025). Prinsip gotong royong juga menjadi landasan kepribadian bangsa yang diusung oleh partai dalam gerakannya (Gamedia, 2023). Kombinasi antara sejarah perjuangan, figur sentral Megawati Soekarnoputri, dan ideologi Soekarnoisme inilah yang membentuk citra dan merek politik PDI Perjuangan di tingkat nasional.

Dalam lanskap politik Provinsi Bali, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan menunjukkan dominasi yang signifikan dan berkelanjutan. Dominasi ini tercermin jelas dari hasil pemilihan umum legislatif, di mana partai ini secara konsisten meraih mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Sebagai contoh, pada periode 2019-2024, PDI Perjuangan berhasil mengamankan 33 dari 55 kursi yang tersedia, sebuah angka mayoritas absolut yang jauh melampaui perolehan partai-partai lainnya.

Dominasi elektoral yang begitu kuat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah proses politik yang terencana dan strategi yang dieksekusi secara sistematis. Laporan ini berargumen bahwa DPD PDI Perjuangan Bali secara efektif mengoperasionalkan fungsi-fungsi



politik fundamentalnya sebagai sebuah strategi komunikasi politik yang canggih dan terintegrasi. Setiap fungsi mulai dari pendidikan dan sosialisasi politik hingga agregasi kepentingan tidak dijalankan secara terpisah, melainkan dirangkai menjadi sebuah orkestrasi komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hegemoni ideologis dan elektoral di provinsi tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap implementasi fungsi-fungsi ini di tingkat DPD Bali menjadi sebuah studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana sebuah partai politik mampu menerjemahkan ideologi nasionalnya ke dalam praktik politik lokal yang efektif dan beresonansi kuat dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menyoroti peran teoretis partai politik, konteks ideologis PDI Perjuangan secara nasional, serta dominasi elektoralnya yang nyata di Provinsi Bali, maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab satu pertanyaan utama yang komprehensif. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: **"Bagaimana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali secara strategis mengimplementasikan fungsi-fungsi politik fundamental (pendidikan, sosialisasi, dan agregasi kepentingan) sebagai sebuah instrumen komunikasi politik yang terintegrasi untuk memperkuat citra ideologis, membangun resonansi kultural, dan mempertahankan hegemoni politiknya di Provinsi Bali?"**

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik dan Fungsi Fundamentalnya

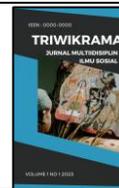
Partai politik secara umum didefinisikan sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan utama untuk memperoleh dan merebut kekuasaan politik secara konstitusional guna melaksanakan kebijakan mereka (Litbang Kompas, 2024). Dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peranan krusial sebagai pilar demokrasi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) dan jembatan strategis yang menghubungkan proses pemerintahan dengan warga negara (Subekti dkk, 2025). Keberadaannya menjadi instrumen penting bagi partisipasi warga negara dalam mengurus negara (Fales, 2018).

Untuk melegitimasi eksistensinya, partai politik menjalankan serangkaian fungsi fundamental. Para ahli ilmu politik mengidentifikasi beberapa fungsi utama, di antaranya:

1. Pendidikan dan Sosialisasi Politik: Fungsi ini merupakan proses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya (Subekti dkk, 2025). Sosialisasi politik adalah proses penanaman nilai dan orientasi politik yang memperkenalkan individu pada sistem politik (Suparta, 2021), yang dapat berlangsung seumur hidup untuk membangun, memelihara, atau bahkan mengubah budaya politik (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022). Partai politik melaksanakan fungsi ini melalui berbagai metode seperti diskusi, seminar, dan kegiatan sosial untuk menanamkan ideologi dan program partai kepada anggota dan masyarakat luas (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2024).
2. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan: Partai politik berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat (Litbang Kompas, 2024). Proses ini dikenal sebagai agregasi kepentingan (*interest aggregation*), di mana partai menampung, menghimpun, dan menggabungkan berbagai kepentingan tersebut untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik (Litbang Kompas, 2024).
3. Komunikasi Politik: Fungsi ini menempatkan partai sebagai penghubung dua arah. Partai menyalurkan aspirasi dari arus bawah (rakyat) ke arus atas (pemerintah), dan sebaliknya, menyalurkan informasi kebijakan dari pemerintah kepada rakyat (Fakultas Hukum Universitas

*Corresponding author

E-mail addresses: prasetyaananda075@student.unud.ac.id



Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022). Komunikasi ini vital untuk memastikan program partai dapat berjalan dengan baik (Litbang Kompas, 2024).

4. Rekrutmen Politik: Partai politik adalah wadah utama untuk mempersiapkan dan menyeleksi kader-kader yang akan mengisi jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Komunikasi Politik sebagai Instrumen Partai

Komunikasi politik adalah inti dari aktivitas partai. Ia merupakan proses penyampaian informasi yang mengandung muatan politik dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan memengaruhi cara pandang dan perilaku politik (Litbang Kompas, 2024). Strategi komunikasi politik menjadi kunci bagi partai untuk menarik simpati masyarakat (Kurniaty, 2023), membangun citra (PDI Perjuangan Bali, 2020), dan pada akhirnya memenangkan kontestasi elektoral (Kurniawan & Handayani, 2022).

Salah satu model klasik untuk menganalisis proses ini adalah model Lasswell, yang membedah komunikasi ke dalam lima komponen: Siapa mengatakan Apa, melalui Saluran Apa, kepada Siapa, dengan Efek Apa? (*Who says what, in which channel, to whom, with what effect?*) (Sekretariat DPRD Kota Batam, 2014). Kerangka ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam strategi komunikasi sebuah partai:

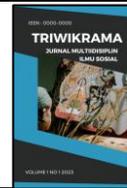
1. Komunikator (Siapa): Aktor yang menyampaikan pesan, bisa berupa pemimpin partai, kader, atau juru bicara (Kurniaty, 2023).
2. Pesan (Apa): Isi komunikasi yang disampaikan, yang bisa berupa ideologi, platform, atau retorika politik untuk membentuk opini publik.
3. Saluran (Saluran Apa): Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti kampanye tatap muka, media massa, atau media sosial (Kurniaty, 2023).
4. Khalayak (Kepada Siapa): Target audiens dari komunikasi politik, yang bisa berupa masyarakat umum, pemilih pemula, atau kelompok kepentingan tertentu (Sekretariat DPRD Kota Batam, 2014).
5. Efek (Efek Apa): Dampak yang diharapkan dari komunikasi, seperti perubahan sikap, peningkatan elektabilitas, atau penguatan loyalitas (Sekretariat DPRD Kota Batam, 2014).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk menganalisis dan mensintesis informasi dari beragam sumber dokumen guna membangun pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai fenomena yang diteliti, yakni implementasi fungsi politik sebagai komunikasi politik oleh DPD PDI Perjuangan Bali.

Sumber data untuk penelitian ini bersifat sekunder, yang secara eksklusif berasal dari kumpulan materi yang telah disediakan. Materi tersebut mencakup berbagai jenis dokumen, antara lain: kutipan dari jurnal-jurnal ilmiah di bidang ilmu politik dan komunikasi (Litbang Kompas, 2024), artikel berita dari media massa daring nasional dan lokal (Devita, 2020), konten dari situs web resmi PDI Perjuangan baik di tingkat pusat maupun daerah (Gamedia, 2023), dokumen resmi pemerintah seperti data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan situs web DPRD, serta materi audiovisual dari platform digital seperti YouTube (Pratiwi & Murdika, 2024). Keragaman sumber ini memungkinkan triangulasi data untuk memperkuat validitas temuan.

Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi dan kodifikasi data berdasarkan kategori teoretis fungsi-fungsi partai politik (pendidikan, sosialisasi, agregasi kepentingan, dan lain-lain). Kedua, data empiris yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut disintesis untuk menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi tersebut diwujudkan dalam



bentuk aktivitas konkret oleh DPD PDI Perjuangan Bali. Ketiga, aktivitas-aktivitas tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori komunikasi politik, dengan membedah unsur-unsur seperti komunikator, pesan, saluran, dan khalayak. Tahap akhir adalah interpretasi, di mana temuan-temuan tersebut dihubungkan kembali untuk menjawab rumusan masalah utama. Tujuannya bukan sekadar mendeskripsikan kegiatan partai, melainkan menginterpretasikan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai komponen dari sebuah strategi komunikasi politik yang koheren dan disengaja, yang dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu di Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis mendalam terhadap berbagai sumber data menunjukkan bahwa DPD PDI Perjuangan Bali secara aktif dan sistematis mengimplementasikan fungsi-fungsi teoritis partai politik. Implementasi ini melampaui seremoni formal, diwujudkan melalui serangkaian kegiatan nyata yang terstruktur. Program-program seperti pendidikan politik bagi kader, advokasi kebijakan publik, bakti sosial, dan dialog interaktif dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan berbagai segmen, mulai dari pemuda, tokoh adat, hingga pelaku ekonomi, partai ini tidak hanya menyerap aspirasi tetapi juga memperkuat basis elektoralnya. Pendekatan proaktif ini menegaskan upaya partai untuk menjadi entitas politik yang dinamis dan relevan.

Implementasi Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Politik

Implementasi fungsi pendidikan dan sosialisasi politik dijalankan melalui pendekatan strategis yang memadukan indoktrinasi ideologis dengan pelestarian budaya lokal, dengan fokus utama pada generasi muda. Melalui sistem pendidikan formal, negara menanamkan ideologi dominan seperti nasionalisme dan nilai-nilai kewarganegaraan untuk menciptakan keseragaman pandangan dan loyalitas. Namun, proses ini diimbangi dengan upaya pelestarian budaya lokal yang memperkuat identitas komunal dan kearifan tradisional. Perpaduan ini bertujuan membentuk warga negara yang ideal: loyal kepada negara, namun tetap berakar kuat pada identitas budayanya, sehingga menjamin keberlanjutan sistem politik sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

- 1. Pendidikan Politik melalui Indoktrinasi Ideologis dan Kultural:** Salah satu wujud paling menonjol dari fungsi pendidikan politik adalah penyelenggaraan perayaan Bulan Bung Karno setiap tahunnya. Kegiatan ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah platform pendidikan ideologi yang masif. DPD PDI Perjuangan Bali mengisi perayaan ini dengan berbagai lomba yang dibuka untuk umum, seperti lomba musikalisasi puisi Bung Karno, lomba film pendek dan dokumenter dengan tema yang selaras dengan ajaran Trisakti seperti Berdikari Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bali (Isyananda & Yuwanto, 2025). Melalui kegiatan ini, ajaran-ajaran Soekarno tidak disampaikan sebagai doktrin yang kaku, melainkan dibingkai sebagai nilai-nilai yang relevan dan hidup dalam konteks Bali kontemporer. Acara ini secara konsisten diliput oleh media dan dihadiri oleh pimpinan partai, yang memperkuat pesan bahwa PDI Perjuangan adalah pewaris sah pemikiran Bung Karno (PorosBali.com, 2021).
- 2. Sosialisasi Politik Generasi Muda:** Partai secara eksplisit menargetkan generasi muda sebagai subjek utama sosialisasi politik. Salah satu program unggulannya adalah Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi se-Bali. Tujuan dari kegiatan ini



dinyatakan secara terbuka, yaitu untuk meningkatkan literasi budaya Bali dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri (Pratiwi & Murdika, 2024). Program ini memiliki fungsi ganda: di satu sisi, ia menjadi ajang rekrutmen untuk mengidentifikasi calon-calon kader potensial dari kalangan terpelajar. Disisi lain, ia menjadi sarana sosialisasi yang efektif, menanamkan citra bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang peduli pada pendidikan, intelektualitas, dan kebudayaan, serta mengasosiasikan identitas partai dengan prestasi akademik di kalangan anak muda.

- 3. Penguatan Budaya Lokal sebagai Media Sosialisasi:** DPD PDI Perjuangan Bali secara strategis memosisikan diri sebagai penjaga dan pelestari kebudayaan Bali. Hal ini diwujudkan dengan menyelenggarakan dan mensponsori berbagai kompetisi yang berakar pada kearifan lokal (*kearifan lokal*). Beberapa contohnya adalah lomba desain kreasi busana adat Bali, lomba menulis aksara Bali, hingga lomba yang lebih kontemporer seperti lomba mixologi arak Bali dan barista kopi Bali (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019). Kegiatan-kegiatan ini secara cerdas menghubungkan agenda partai dengan kebijakan pemerintah provinsi yang juga dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, khususnya program *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dan Pergub tentang penggunaan busana adat (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019). Dengan demikian, partai tidak hanya melakukan sosialisasi politik, tetapi juga membangun sebuah narasi dimana identitas politik partai menyatu dengan identitas kultural masyarakat Bali.

Implementasi Fungsi Agregasi dan Artikulasi Kepentingan

Implementasi fungsi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat merupakan pilar demokrasi yang esensial. Proses ini berjalan melalui dua jalur utama yang saling melengkapi. Pertama, melalui kanal institusional formal, seperti partai politik, pemilu, dan lembaga perwakilan. Jalur ini secara sistematis mengubah berbagai tuntutan masyarakat menjadi alternatif kebijakan yang terstruktur dan dapat diperdebatkan secara resmi.

Kedua, melalui aksi kerakyatan yang bersifat langsung, seperti demonstrasi, petisi, audiensi, maupun kampanye di media sosial. Jalur informal ini sering kali menjadi cerminan tuntutan publik yang mendesak dan belum terakomodasi oleh lembaga formal, memberikan tekanan langsung kepada para pengambil keputusan

- 1. Agregasi Kepentingan melalui Aksi Kerakyatan (*Bakti Sosial*):** Slogan "partai wong cilik" tidak dibiarkan sebagai jargon kosong, melainkan diterjemahkan ke dalam berbagai program bakti sosial yang nyata dan berdampak langsung. Salah satu contoh paling signifikan adalah distribusi bantuan 30 ton beras kepada masyarakat melalui DPC se-Bali, di mana beras tersebut secara khusus dibeli dari petani lokal di Tabanan dan Jembrana (PorosBali.com, 2021). Aksi ini mengagregasi beberapa kepentingan sekaligus: membantu warga yang membutuhkan, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal. Kegiatan lain yang rutin dilakukan adalah donor darah, pembersihan danau, sungai, dan laut, serta pemberian bantuan kepada siswa yatim piatu dan korban bencana alam (Maramis & Ruru, 2020). Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai mekanisme agregasi kepentingan yang sangat efektif, karena menunjukkan secara langsung bahwa partai mendengar dan merespons kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.
- 2. Artikulasi Kepentingan melalui Kanal Formal:** Aspirasi dan kepentingan yang telah diserap dari masyarakat kemudian diartikulasikan melalui kanal formal, yakni melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Bali. Struktur fraksi ini dirancang untuk memastikan adanya garis komando yang jelas dari partai ke lembaga legislatif, di mana Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali menjabat sebagai Penasihat Fraksi (Redaksi, 2021). Mekanisme formal seperti masa reses digunakan oleh para anggota legislatif dari PDI Perjuangan untuk



secara resmi menampung aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan mereka masing-masing (Edison, 2020). Dengan demikian, fraksi menjadi corong resmi partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah diagregasi di tingkat akar rumput menjadi usulan kebijakan, peraturan daerah, dan alokasi anggaran di tingkat provinsi.

Implementasi Fungsi Komunikasi Politik

Implementasi fungsi komunikasi politik DPD PDI Perjuangan Bali dilakukan secara strategis untuk menjangkau khalayak yang beragam. Secara internal, komunikasi diarahkan kepada kader dan simpatisan melalui rapat konsolidasi, pelatihan, dan media internal untuk memperkuat soliditas dan pemahaman ideologi. Untuk khalayak eksternal, yaitu masyarakat luas, partai ini memanfaatkan berbagai saluran. Mulai dari media massa konvensional, kampanye aktif di media sosial untuk menyasar pemilih muda, hingga kegiatan turun langsung ke masyarakat seperti *blusukan* dan bakti sosial. Pendekatan multi-saluran ini bertujuan untuk menyebarkan visi, program kerja, dan sikap politik partai, sekaligus menyerap aspirasi warga secara efektif.

- 1. Kanal Komunikasi Institusional:** Partai mengelola sebuah situs web resmi provinsi, pdiperjuanganbali.id. Situs ini berfungsi sebagai etalase digital utama, yang secara rutin mempublikasikan berita-berita kegiatan partai. Secara khusus, situs ini banyak menyoroti aktivitas para kader utama yang menduduki jabatan publik, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota (Haris, 2011). Hal ini secara strategis menghubungkan keberhasilan pemerintahan daerah dengan citra partai.
- 2. Kanal Media Digital dan Sosial:** Selain situs web, partai juga aktif menggunakan platform media digital seperti YouTube. Kanal ini digunakan untuk menyiarkan acara-acara penting, seperti penutupan Bulan Bung Karno, pengumuman pemenang lomba, atau kegiatan sosial (Pratiwi & Murdika, 2024). Setiap konten video secara konsisten dibingkai dengan elemen-elemen merek partai, termasuk logo, slogan seperti *Solid Bergerak* dan *Satyam Eva Jayate*, serta tagar resmi. Ini adalah upaya sadar untuk membangun identitas visual dan narasi yang kohesif di ruang digital.
- 3. Relasi dengan Media Massa Lokal:** DPD PDI Perjuangan Bali menjalin hubungan yang efektif dengan media massa lokal. Berbagai kegiatannya, baik yang bersifat seremonial, sosial, maupun politik, mendapatkan porsi pemberitaan yang luas dari media-media utama di Bali seperti *BaliPost* dan *NusaBali* (PorosBali.com, 2021). Liputan media ini berfungsi sebagai amplifi er yang menyebarluaskan pesan dan citra partai kepada audiens yang lebih luas, melampaui jangkauan kanal milik partai sendiri.

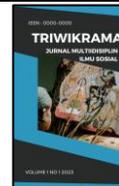
Untuk merangkum temuan-temuan di atas, berikut disajikan matriks yang memetakan hubungan antara fungsi politik teoretis dengan implementasi konkret dan tujuan komunikasinya.

Tabel 1 Matriks Implementasi Fungsi Politik sebagai Komunikasi Politik oleh DPD PDI Perjuangan Bali

Fungsi Politik (Teori)	Implementasi/Aktivitas Spesifik (Empiris)	Tujuan Komunikasi Politik	Khalayak Sasaran	Saluran Komunikasi Utama
Pendidikan Politik	Perayaan Bulan Bung Karno	Menanamkan ideologi Soekarno, memperkuat	Kader, simpatisan, masyarakat umum.	Acara seremonial, media massa,

*Corresponding author

E-mail addresses: prasetyaananda075@student.unud.ac.id



		narasi perjuangan partai.		media sosial.
Sosialisasi Politik	Lomba Cerdas Cermat, Lomba Budaya Bali (Aksara, Busana)	Merekrut & membentuk kader muda, memposisikan partai sebagai pelindung budaya Bali.	Generasi muda (pelajar, mahasiswa), komunitas budaya.	Kompetisi, media sosial, berita lokal.
Agregasi Kepentingan	<i>Bakti Sosial</i> (pembagian beras, donor darah, bantuan bencana)	Membangun citra "partai wong cilik," menunjukkan kepedulian & responsivitas.	Masyarakat umum, kelompok marjinal, korban bencana.	Kegiatan langsung, berita media, rilis pers.
Artikulasi Kepentingan	Kinerja Fraksi di DPRD, Reses Anggota Legislatif	Menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan, menunjukkan akuntabilitas.	Konstituen di dapil, masyarakat umum.	Rapat DPRD, kunjungan kerja, media massa.
Komunikasi Politik	Pidato Ketua DPD, Pengelolaan Website & Media Sosial	Membangun citra pemimpin, mengontrol narasi partai, menyebarkan informasi.	Kader, media, publik digital.	Pidato politik, website resmi, YouTube.

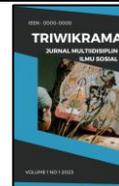
Sumber: Dikelola dari Berbagai Sumber oleh Penulis, 2025

PEMBAHASAN

Dekodifikasi Pesan: Penerjemahan Ideologi Abstrak menjadi Aksi Komunikatif

Strategi komunikasi DPD PDI Perjuangan Bali yang paling mendasar adalah kemampuannya untuk menerjemahkan atau mendekodifikasi konsep-konsep ideologis yang abstrak menjadi tindakan komunikatif yang konkret dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ideologi partai yang berlandaskan Pancasila 1 Juni dan ajaran Trisakti Soekarno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak hanya diajarkan melalui ceramah, tetapi dipertunjukkan melalui aksi nyata.

Sebagai contoh, prinsip *Gotong Royong*, yang merupakan inti dari kepribadian bangsa menurut PDI Perjuangan (Gamedia, 2023), dikomunikasikan bukan melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata seperti mengorganisir pembagian 30 ton beras yang dibeli dari petani lokal untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan (PorosBali.com, 2021). Aksi ini secara simultan mengirimkan beberapa pesan: kepedulian terhadap "wong cilik", dukungan terhadap ekonomi



petani lokal (berdikari di bidang ekonomi), dan praktik nyata kebersamaan. Demikian pula, pilar berkepribadian dalam kebudayaan tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan melalui penyelenggaraan lomba-lomba yang mengangkat kearifan lokal seperti lomba desain motif endek, barista kopi Bali, dan mixologi arak Bali (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019). Dengan cara ini, partai mempraktekkan apa yang disebut sebagai ideologi yang dihidupi (*lived ideology*). Strategi menunjukkan, bukan sekadar mengatakan ini membuat nilai-nilai politik yang abstrak terasa personal, otentik, dan relevan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, yang pada gilirannya membangun pondasi loyalitas yang dalam dan sulit digoyahkan.

Analisis Komunikasi Politik: Komunikator, Saluran, dan Khalayak

Dengan mengadopsi kerangka analisis komunikasi klasik seperti model Lasswell (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa?) (Sekretariat DPRD Kota Batam, 2014), kita dapat membedah strategi komunikasi DPD PDI Perjuangan Bali secara lebih sistematis.

- 1) Komunikator (Siapa):** Komunikasi partai tidak dijalankan oleh fungsionaris anonim. Strateginya sangat bertumpu pada figur-figur kunci yang memiliki visibilitas dan otoritas tinggi. Komunikator utamanya adalah Ketua DPD, Wayan Koster, yang kekuatannya sebagai komunikator politik dilipatgandakan oleh jabatannya sebagai Gubernur Bali. Setiap pidato, kebijakan, dan kehadirannya dalam acara partai menjadi pesan utama partai itu sendiri (PorosBali.com, 2021). Komunikator lainnya adalah anggota Fraksi di DPRD yang bertindak sebagai penyambung lidah resmi di lembaga legislatif, serta kader-kader di tingkat akar rumput yang menjadi ujung tombak saat pelaksanaan kegiatan *bakti sosial*.
- 2) Pesan (Apa):** Pesan inti yang disampaikan secara konsisten adalah adanya keselarasan ideologis dan kultural antara PDI Perjuangan dengan identitas masyarakat Bali. Meta-narasi yang dibangun adalah: PDI Perjuangan adalah rumah politik yang alamiah bagi masyarakat Bali karena kami adalah penjaga sejati nasionalisme Soekarno dan kebudayaan Bali. Pesan ini diperkuat dengan slogan-slogan seperti *Satyam Eva Jayate* (Kebenaran Pasti Menang) yang beresonansi dengan spiritualitas lokal (Pratiwi & Murdika, 2024).
- 3) Saluran (Saluran Apa) & Khalayak (Kepada Siapa):** Partai menerapkan pendekatan multi-saluran yang dirancang untuk menjangkau khalayak yang berbeda. Media massa tradisional dan acara-acara seremonial berskala besar (seperti Bulan Bung Karno) digunakan untuk menargetkan masyarakat umum. Kompetisi dan aktivitas di media sosial secara spesifik ditujukan untuk menjangkau dan melibatkan generasi muda. Kegiatan *bakti sosial* yang bersifat tatap muka langsung menargetkan masyarakat di tingkat akar rumput (*grassroots*). Sementara itu, kanal-kanal formal seperti rapat dengar pendapat di DPRD digunakan untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok kepentingan dan konstituen yang spesifik.

Komunikasi Simbolik dan Pembangunan Hegemoni Kultural

Bentuk komunikasi yang paling kuat dan mungkin paling efektif dari DPD PDI Perjuangan Bali adalah komunikasi simbolik. Dengan secara konsisten membungkus kegiatan-kegiatan politiknya dalam simbol-simbol kebudayaan Bali seperti penggunaan busana adat dalam acara resmi, lomba aksara Bali, hingga penggunaan tumpeng sebagai simbol perayaan (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019) partai tidak hanya berpolitik, tetapi juga terlibat dalam sebuah proyek pembangunan hegemoni kultural.



Analisis ini melampaui pemahaman bahwa kegiatan tersebut hanyalah upaya *public relations*. Pola yang berulang dalam menggabungkan agenda partai dengan pelestarian budaya, yang bahkan secara eksplisit dikaitkan dengan program unggulan pemerintah provinsi Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019), menunjukkan sebuah strategi jangka panjang yang disengaja. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah fusi ideologis-kultural di benak publik. Implikasi dari strategi ini sangat mendalam: PDI Perjuangan diposisikan sedemikian rupa sehingga menentang partai secara politik dapat dibingkai atau dipersepsikan sebagai tindakan yang juga menentang kelestarian budaya Bali itu sendiri. Ini menciptakan sebuah benteng pertahanan politik yang sangat tinggi bagi para kompetitor dan secara efektif mengukuhkan posisi dominan partai sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial dan budaya Bali.

Dualitas Komunikasi dan Implikasi Struktural

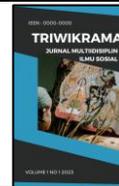
Terdapat sebuah dualitas yang menarik dalam strategi komunikasi partai. Di satu sisi, komunikasi yang berbasis aktivitas (*activity-based communication*) sangatlah terlihat, hidup, dan efektif menjangkau publik. Berbagai kegiatan sosial, budaya, dan seremonial didokumentasikan dan disebarluaskan secara masif (PorosBali.com, 2021). Namun disisi lain, komunikasi yang bersifat institusional formal (*formal institutional communication*) terkesan lebih tertutup atau opak. Upaya untuk menemukan susunan kepengurusan lengkap DPD PDI Perjuangan Bali periode terbaru melalui sumber-sumber publik yang tersedia terbukti sulit.

Kondisi ini dapat diinterpretasikan bukan sebagai kelemahan manajemen informasi semata, melainkan sebagai sebuah pilihan strategis. Partai memilih untuk memproyeksikan kekuasaan dan citranya melalui *kinerja karismatik* para pemimpinnya, terutama sang Ketua DPD, yang mencerminkan model kepemimpinan di tingkat nasional yang terpusat pada figur Megawati Soekarnoputri (Nugroho, 2016). Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan hubungan yang bersifat personal dan langsung dengan para pemilih, yang mungkin dianggap lebih efektif dalam konteks budaya politik Indonesia yang masih menghargai patronase dan kepemimpinan personal, dibandingkan dengan transparansi birokrasi yang bersifat impersonal dan formal.

Peran Sentral Pemimpin: Fusi Kekuasaan Partai dan Negara

Analisis strategi komunikasi DPD PDI Perjuangan Bali tidak akan lengkap tanpa menyoroti peran sentral pemimpinnya dan strategi pembauran (fusi) antara ranah partai dan ranah negara. Sosok Wayan Koster, yang secara bersamaan menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali dan Gubernur Bali, menjadi personifikasi dari fusi ini.

Data secara konsisten menunjukkan bagaimana peran sebagai pejabat negara dan sebagai pemimpin partai dijalankan secara simultan dan saling memperkuat. Sebagai Gubernur, ia mengimplementasikan kebijakan seperti *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yang kemudian diadopsi dan dirayakan sebagai bagian dari agenda partai dalam berbagai kegiatan (Sekretariat DPRD Provinsi Bali, 2019). Sebagai Ketua DPD, ia memimpin langsung kegiatan-kegiatan partai seperti pembagian bantuan sosial, yang seringkali juga melibatkan aparaturnya atau sumber daya yang diasosiasikan dengan pemerintah (PorosBali.com, 2021). Ini bukanlah sekadar tumpang tindih peran, melainkan sebuah strategi komunikasi yang sangat kuat. Dengan membaurkan kedua peran tersebut, partai secara efektif mengirimkan pesan bahwa PDI Perjuangan *adalah* pemerintah, dan kemajuan serta kesejahteraan Bali adalah hasil kerja partai. Strategi ini secara signifikan meningkatkan legitimasi partai di mata publik, membuatnya tampak sebagai satu-satunya kekuatan politik yang mampu dan paling berhak untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi fungsi politik DPD PDI Perjuangan Bali, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental. Implementasi fungsi-fungsi seperti pendidikan politik, sosialisasi, dan agregasi kepentingan oleh DPD PDI Perjuangan Bali bukanlah serangkaian tugas administratif yang terpisah dan berjalan secara mandiri. Sebaliknya, setiap fungsi dijalankan sebagai bagian dari sebuah strategi komunikasi politik yang terencana, terintegrasi, dan sangat canggih.

Pertama, DPD PDI Perjuangan Bali menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menerjemahkan ideologi nasional partai yang bersifat abstrak seperti Pancasila 1 Juni, Marhaenisme, dan Trisakti ke dalam serangkaian aksi komunikatif yang konkret, relevan, dan beresonansi kuat dengan konteks sosial-kultural masyarakat Bali. Prinsip-prinsip seperti gotong royong dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak hanya diwacanakan, tetapi dipertunjukkan melalui kegiatan nyata seperti bakti sosial dan festival budaya, sehingga ideologi tersebut menjadi hidup dan mudah dipahami oleh publik.

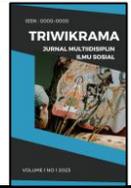
Kedua, strategi komunikasi partai ini secara efektif membangun hegemoni kultural. Dengan secara konsisten memposisikan diri sebagai penjaga dan pelestari utama kebudayaan Bali, dan memadukan agenda politiknya dengan simbol-simbol serta kearifan lokal, partai berhasil menciptakan sebuah narasi dimana identitas PDI Perjuangan menyatu dengan identitas ke-Bali-an itu sendiri. Hal ini menciptakan benteng politik yang kokoh dan meninggikan ambang batas bagi para pesaing politik untuk dapat masuk dan merebut simpati publik.

Ketiga, keberhasilan strategi ini sangat ditopang oleh model komunikasi yang terpusat pada figur pemimpin yang karismatik dan penerapan strategi fusi antara kekuasaan partai dan negara. Dengan menonjolkan peran Ketua DPD yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, partai berhasil memproyeksikan citra sebagai kekuatan politik yang identik dengan pemerintahan dan pembangunan.

Pada akhirnya, dominasi politik DPD PDI Perjuangan di Bali bukanlah semata-mata hasil dari popularitas ideologi atau figur, melainkan buah dari sebuah orkestrasi komunikasi yang disiplin dan berlapis. Partai ini telah berhasil membangun sebuah narasi yang kuat dan meyakinkan, yang menempatkan platform politiknya sebagai representasi paling otentik dari aspirasi, identitas, dan kesejahteraan masyarakat Bali, yang pada akhirnya mengukuhkan posisi hegemoninya di provinsi tersebut.

Saran

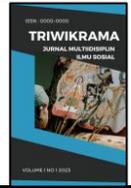
- Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan studi komparatif. Menganalisis strategi komunikasi DPD PDI Perjuangan Bali dengan DPD di provinsi lain yang juga merupakan basis kuat partai, seperti Jawa Tengah, akan sangat bermanfaat. Studi semacam ini dapat mengungkap apakah model hegemoni kultural yang diterapkan di Bali merupakan strategi unik yang disesuaikan dengan konteks lokal, atau merupakan sebuah cetak biru (blueprint) yang direplikasi oleh partai di berbagai daerah dengan penyesuaian seperlunya.
- Meskipun pelibatan generasi muda melalui kompetisi dan acara khusus sudah kuat, terdapat ruang untuk optimalisasi strategi komunikasi digital harian. Mengacu pada temuan penelitian di konteks lain yang menunjukkan adanya kelemahan partai dalam membangun kedekatan



emosional dengan Gen Z melalui media sosial, DPD PDI Perjuangan Bali dapat mengembangkan konten yang lebih interaktif, informal, dan berkelanjutan di platform-platform yang populer di kalangan anak muda (seperti TikTok dan Instagram) untuk membangun hubungan yang lebih dari sekadar partisipasi *event-based*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Devita, R. (2020). *Rangkaian Bulan Bung Karno, PDIP Bali bagikan 30 ton beras*. BALIPOST.com. <https://www.balipost.com/news/2020/06/01/126458/Rangkaian-Bulan-Bung-Karno,PDIP...html>
- Edison, B. T. H. (2020). *Komunikasi politik*. Gibon Books. Jakarta. <https://repository.paramadina.ac.id/1077/1/Dr.%20Edison%20-%20Komuikasi%20Politik%20..pdf>
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2022). *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan/>
- Fales, S. (2018). Fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1-14. <https://core.ac.uk/download/pdf/229576018.pdf>
- Gramedia. (2023). *Pengertian, Model & Tujuan Komunikasi Politik*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-komunikasi-politik/>
- Haris, S. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 1-17. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/292/229>
- Isyananda, D., & Yuwanto, Y. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) UNTUK MENINGKATKAN CITRA PARTAI PADA KALANGAN GENERASI Z DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 465-477. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49839>
- Kurniaty, E. Y. (2023). *Pertemuan IX Mata Kuliah: Pengantar Ilmu Politik, Sosialisasi Politik* [Slide presentasi]. Blog Universitas Medan Area. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://eviyunitakurniaty.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/657/2023/06/PIP-8.pdf>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- Litbang Kompas. (2024). *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*. Kompaspedia. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan>
- Maramis, A. C., & Ruru, F. (2020). Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik (Suatu studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Sario Kota Manado). *Jurnal Politico*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/download/30468/29349>
- Nugroho, A. P. (2016). *Partisipasi politik anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo* [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta]. UNY E-Prints. <https://eprints.uny.ac.id/22291/>
- PDI Perjuangan Bali. (2020). *Sejarah Singkat*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.pdiperjuanganbali.id/page/read/7>



- PDI Perjuangan. (2025). *Pelantikan Pengurus DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Syj4fXZbE_Q
- PorosBali.com. (2021). *Masyarakat antusias donor darah PDI Perjuangan Kota Denpasar*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.porosbali.com/read/202106110002/masyarakat-antusias-donor-darah-pdi-perjuangan-kota-denpasar.html>
- Pratiwi, F. N., & Rahmawati, A. (2023). Representasi kekuasaan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik peringatan HUT ke-50 PDI-P. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 21, 119-130. <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4842>
- Pratiwi, N. I., & Murdika, I. K. G. G. (2024). Communication strategies of political parties in increasing electability in Denpasar. *E-Journal of Cultural Studies*, 17(4), 1-13. <https://doi.org/10.24843/cs.2024.v17.i04.p01>
- Redaksi. (2021). *Bakti sosial peringatan bulan Bung Karno, DPD PDI Perjuangan Bali serahkan bantuan 30 ton beras*. Bali Ekbis. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.baliekbis.com/bakti-sosial-peringatan-bulan-bung-karno-dpd-pdi-perjuangan-bali-serahkan-bantuan-30-ton-beras/>
- Sekretariat DPRD Kota Batam. (2014). *Partai PDIP NEW*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://dprd.batam.go.id/partai-pdip-new/>
- Sekretariat DPRD Provinsi Bali. (2019). *55 anggota DPRD Bali terpilih dilantik hari ini*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://sekwardprd.baliprov.go.id/55-anggota-dprd-bali-terpilih-dilantik-hari-ini/>
- Sekretariat DPRD Provinsi Bali. (2024). *Fraksi PDI Perjuangan*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://sekwardprd.baliprov.go.id/fraksi-pdi-perjuangan/>
- Subekti, D., Putra, D. S., & Nasuhaidi, N. (2025). Evaluating Internal Democratic Process in Political Parties: A Case Study of PDI-P in the Reform Era. *PERSPEKTIF*, 14(2), 440-452. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i2.14163>
- Suparta, I. K. (2021). *PDI Perjuangan Bali gelar berbagai lomba dan bakti sosial*. ANTARA News Bali. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://bali.antaranews.com/berita/236062/pdi-perjuangan-bali-gelar-berbagai-lomba-dan-bakti-sosial>
- Suwendra, I. W., & Putri, N. K. A. M. E. (2023). ANALISIS FRAMING KEBIJAKAN GUBERNUR BALI DALAM PEMBATALAN DRAWING PIALA DUNIA U-20. *Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation*, 2(2), 108-122. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/JSv/article/view/986>